

Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Cibereum Kabupaten Ciamis

Dian Kusdiana¹, Tati Sarihati²

¹ Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

² Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: diankusdina@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v10i1.762>

Article Info

Article History;

Received:

2025-11-17

Revised:

2026-02-12

Accepted:

2026-03-17

Abstract: *This study aims to analyse the application of collaborative governance in the development of Cibereum Tourism Village, Ciamis Regency. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The analytical framework refers to the Ansell and Gash (2008) model, which covers five main dimensions: initial conditions, resources, institutional design, leadership, and collaboration processes. The results show that tourism development in Cibereum still faces challenges in terms of community participation, the dominance of certain actors, and suboptimal institutional structures. Collaboration between actors is not yet fully structured and consensus-oriented, so trust and commitment between parties still need to be strengthened. The community is beginning to feel the economic benefits of tourism activities, but does not yet understand their strategic role in the management and sustainability of the destination. This study recommends strengthening local institutional capacity, establishing an inclusive multi-stakeholder forum, and facilitation from external actors such as NGOs. With the implementation of effective collaborative governance, Cibereum Tourism Village has the potential to become a model for inclusive, equitable, and sustainable community-based tourism development.*

Keywords: *collaborative governance; tourism village; community participation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Cibereum, Kabupaten Ciamis. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kerangka analisis mengacu pada model Ansell dan Gash (2008) yang mencakup lima dimensi utama: kondisi awal, sumber daya, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata di Cibereum masih menghadapi tantangan dalam hal partisipasi masyarakat, dominasi aktor tertentu, dan belum optimalnya struktur kelembagaan. Kolaborasi antaraktor belum sepenuhnya terstruktur dan berorientasi pada konsensus, sehingga kepercayaan dan komitmen antar pihak masih perlu diperkuat. Masyarakat mulai merasakan manfaat ekonomi dari aktivitas wisata, namun belum memahami peran strategis mereka dalam pengelolaan dan keberlanjutan destinasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, pembentukan forum multipihak yang inklusif, serta fasilitasi dari aktor eksternal seperti LSM. Dengan penerapan *collaborative governance* yang efektif, Desa Wisata Cibereum berpotensi menjadi model pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: collaborative governance; desa wisata; partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian global. Pada tahun 2024, sektor ini menyumbang sekitar 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dengan nilai mencapai USD 11,1 triliun, mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan pasca-pandemi yang kuat WTTC, 2024 (1). Di negara berkembang, khususnya di wilayah pedesaan, pariwisata berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (2)(3)(4). Di Indonesia, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar USD 16,7 miliar pada tahun 2024, meningkat 19,3% dibandingkan tahun sebelumnya, dan berkontribusi sebesar 4,01% terhadap PDB nasional. Program strategis seperti pengembangan desa wisata, digitalisasi destinasi, dan penguatan ekosistem pariwisata berbasis komunitas menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, keterkaitan antara sektor pariwisata dan pembangunan ekonomi, khususnya di tingkat lokal, semakin menguat dan menuntut tata kelola yang kolaboratif dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat (5).

Dalam konteks Indonesia, pariwisata pedesaan melalui pengembangan desa wisata memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan. Desa wisata merupakan bentuk pariwisata berbasis masyarakat yang mengandalkan keunikan alam, budaya, dan kehidupan sosial pedesaan sebagai daya tarik utama, sekaligus berfungsi sebagai instrumen peningkatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, penguatan kohesi sosial, serta penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan (6).

Keanekaragaman budaya dan hayati yang dimiliki Indonesia merupakan aset strategis dalam mendorong pengembangan desa wisata sebagai instrumen pembangunan pedesaan dan penguatan ekonomi lokal. Dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan sekitar 700 bahasa daerah, Indonesia memiliki kekayaan sosial-budaya yang dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam perencanaan desa wisata berkelanjutan (7) (8). Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2024 (9), tercatat sebanyak 6.047 desa wisata telah berkembang di seluruh Indonesia. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 4,5% terhadap PDB nasional, menegaskan peran strategis desa wisata dalam pembangunan ekonomi (10) Selain mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, desa wisata juga berfungsi sebagai wahana pelestarian nilai-nilai budaya dan penguatan prinsip keberlanjutan (11), serta turut meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan (12).

Sebagai bagian dari praktik pariwisata berkelanjutan, desa wisata memberikan dampak multidimensi melalui pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya lewat pengembangan usaha mikro yang mempromosikan produk-produk khas seperti kerajinan tangan dan kuliner tradisional (13). Di sisi lain, pelestarian budaya lokal diperkuat melalui pemanfaatan tradisi dan tata ruang khas yang mencerminkan identitas komunitas (14). Pendekatan berbasis komunitas mendorong partisipasi aktif warga, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat fondasi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan demikian, desa wisata menjadi komponen penting dalam strategi pembangunan pariwisata yang inklusif dan berorientasi jangka panjang (15).

Selain itu lebih dari 74 ribu desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menjadikan potensi wisata yang layak untuk dikembangkan. Potensi tersebut mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan desa melalui konsep desa wisata. Program desa wisata dapat menjadi pendorong terwujudnya pariwisata berkelanjutan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (16).

Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) memberikan definisi pariwisata berkelanjutan sebagai aktivitas kepariwisataan yang menerapkan prinsip berkelanjutan pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan dan harapan pengunjung, industri dan masyarakat. Pariwisata berkelanjutan juga menjadi tuntutan bagi pemerintah dan masyarakat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan adalah suatu kebutuhan bagi daerah-daerah di Indonesia yang menjadikan pariwisata sebagai suatu strategi pembangunan. Amanah tersebut menjadikan pariwisata berkelanjutan sebagai suatu langkah yang dituangkan ke dalam perencanaan pembangunan, implementasi program serta evaluasi terhadap penerapan dan pencapaian pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya upaya melestarikan lingkungan dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat di suatu wilayah (17).

Namun demikian, pengembangan Desa Wisata Cibereum hingga saat ini masih belum optimal. Permasalahan yang muncul antara lain lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program wisata, serta minimnya integrasi antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan dan inisiatif masyarakat lokal. Selain itu, infrastruktur pendukung pariwisata seperti akses jalan, fasilitas publik, dan promosi destinasi juga masih tergolong terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan tata kelola yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

Dalam konteks ini, pendekatan *collaborative governance* menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Collaborative governance, sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) (24), merupakan bentuk tata kelola kolaboratif yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme konsensus dan deliberasi. Pendekatan ini memerlukan kepercayaan antarpihak, kesetaraan dalam partisipasi, serta adanya struktur kelembagaan yang mendukung proses kolaboratif. Melalui collaborative governance, pengembangan desa wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau Dinas Pariwisata semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil.

Penerapan collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Cibereum diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan yang selama ini menghambat kemajuan sektor pariwisata lokal. Proses ini membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pembentukan forum multipihak, penguatan regulasi pendukung di tingkat desa maupun kabupaten, serta fasilitasi yang intensif dari aktor-aktor eksternal seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Lebih dari itu, proses kolaborasi juga harus dibangun atas dasar kesetaraan, keterbukaan, dan kepentingan bersama untuk menciptakan hasil yang adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara akurat kondisi objektif di lapangan tanpa manipulasi atau intervensi dari peneliti (18) bahwa penelitian kualitatif bersifat naturalistik dan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data.

Data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan informasi tekstual yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan catatan lapangan (19), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, persepsi, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mengeksplorasi dan memahami variabel secara independen berdasarkan konteks actual (20), Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif

terhadap efektivitas implementasi prinsip *Collaborative Governance* dalam pelayanan publik. (21) penekankan bahwa metode ini cocok digunakan dalam penelitian sosial yang bertujuan untuk memahami perilaku, interaksi, dan struktur sosial secara mendalam. (22) penelitian kualitatif adalah pendekatan interpretatif dan naturalistik yang bertujuan memahami makna suatu fenomena dalam konteks alaminya. Peneliti berusaha menafsirkan dunia berdasarkan perspektif subjek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Cibereum, Kabupaten Ciamis. Melalui pendekatan kualitatif dan kerangka teori Ansell (23), pembahasan ini mengkaji secara mendalam dinamika kolaborasi antaraktor baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, maupun organisasi lokal dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan desa wisata. Analisis dilakukan berdasarkan lima dimensi utama *collaborative governance*, yaitu kondisi awal, sumber daya, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi, guna memahami sejauh mana tata kelola kolaboratif dapat mendorong pembangunan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas.

1. Kondisi Awal

Pengembangan Desa Wisata Cibereum pada tahap awal menunjukkan karakteristik tata kelola yang masih didominasi pendekatan *top-down*. Inisiatif pengembangan wisata memang muncul dari aktor lokal, namun belum terstruktur dalam sistem kolaboratif yang sistematis. Minimnya ruang deliberatif dan transparansi dalam penyusunan program menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya terlibat sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kondisi ini selaras dengan temuan Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa *collaborative governance* sering kali gagal berkembang ketika terdapat ketimpangan partisipasi dan rendahnya kepercayaan awal antaraktor.

Secara teoritis, *collaborative governance* menekankan pentingnya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, serta komitmen bersama sejak tahap awal proses kolaborasi. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan, maka rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program akan rendah. Hal ini memperkuat argumen bahwa keberlanjutan desa wisata sangat bergantung pada partisipasi substantif, bukan sekadar partisipasi simbolik. Oleh karena itu, transformasi dari pendekatan *top-down* menuju model

partisipatif menjadi prasyarat normatif dan strategis dalam pengembangan Desa Wisata Cibereum.

2. Sumber Daya

Desa Cibereum memiliki modal alam dan sosial yang signifikan, seperti lanskap alam yang asri, tradisi budaya yang masih terpelihara, serta semangat gotong royong masyarakat. Dalam perspektif pembangunan berbasis komunitas, modal sosial merupakan faktor kunci dalam menciptakan keberlanjutan program. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena belum adanya integrasi kelembagaan yang kuat antara pemerintah desa, BumDes, Pokdarwis, dan kelompok masyarakat lainnya.

Literatur governance menegaskan bahwa kolaborasi membutuhkan struktur pembagian peran yang jelas agar tidak terjadi dominasi atau eksklusivitas dalam pengelolaan. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan regulasi, pengelolaan wisata berisiko berjalan secara informal dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga penguatan kapasitas organisasi dan tata kelola berbasis konsensus.

3. Desain Kelembagaan

Struktur kelembagaan dalam pengelolaan Desa Wisata Cibereum masih menunjukkan keterbatasan dalam mendukung prinsip *collaborative governance*. Dominasi aktor tertentu dalam pengambilan keputusan mencerminkan belum terbangunnya mekanisme partisipatif yang setara. Padahal desain kelembagaan kolaboratif harus menyediakan forum multipihak yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Tidak adanya regulasi formal atau peraturan desa yang secara eksplisit mengatur mekanisme kolaborasi lintas sektor menunjukkan adanya kesenjangan struktural. Dalam kerangka *good governance*, partisipasi dan akuntabilitas hanya dapat terwujud apabila terdapat sistem dan aturan main yang jelas. Oleh karena itu, pembentukan forum multipihak atau dewan pengelola desa wisata bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan kebutuhan normatif untuk menciptakan legitimasi dan kesinambungan tata kelola.

4. Kepemimpinan

Kepemimpinan lokal memiliki peran sentral dalam membentuk dinamika kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Cibereum. Secara empiris, figur informal seperti tokoh masyarakat, mantan kepala desa, atau pelaku usaha lokal sering menjadi inisiator dan motor penggerak kegiatan wisata. Mereka memiliki legitimasi sosial, kedekatan emosional dengan warga, serta pengaruh kultural yang kuat sehingga mampu membangun partisipasi awal dan

kepercayaan di tingkat komunitas. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Crosby dan Bryson yang menegaskan bahwa kepemimpinan kolaboratif sering kali bertumpu pada aktor yang memiliki legitimasi sosial dan kapasitas membangun jejaring lintas kepentingan.

Namun demikian, dominasi figur informal yang tidak diimbangi dengan mekanisme kepemimpinan partisipatif berpotensi menciptakan sentralisasi keputusan. Dalam perspektif *collaborative governance*, Ansell dan Gash menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individual, tetapi juga dengan proses fasilitasi dialog, pembangunan kepercayaan, dan penciptaan kesetaraan antaraktor. Ketika kepemimpinan terlalu terpusat, risiko eksklusi sosial dan ketimpangan peran menjadi lebih besar, sehingga aspirasi kolektif masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi.

Lebih lanjut, Emerson dan Nabatchi menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam tata kelola kolaboratif harus bersifat fasilitatif dan deliberatif, bukan dominatif. Artinya, pemimpin berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan, mengelola konflik, dan memastikan proses pengambilan keputusan berlangsung secara transparan dan inklusif. Tanpa struktur kepemimpinan kolektif, kolaborasi cenderung bersifat personalistik dan rentan terhadap stagnasi ketika figur kunci tidak lagi aktif.

Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan partisipatif menjadi kebutuhan strategis dalam pengembangan Desa Wisata Cibereum. Pembentukan forum desa wisata, dewan pengelola multipihak, atau tim fasilitator komunitas dapat menjadi instrumen institusional untuk mendistribusikan kepemimpinan secara lebih adil. Dalam kerangka *good governance*, struktur semacam ini memperkuat prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, kepemimpinan tidak lagi bertumpu pada individu tertentu, melainkan menjadi mekanisme kolektif yang legitim dan berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan temuan lapangan dan literatur, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi di Desa Wisata Cibereum sangat bergantung pada transformasi dari kepemimpinan informal yang personalistik menuju kepemimpinan kolaboratif yang institusional dan partisipatif. Kepemimpinan yang inklusif dan adaptif akan memperkuat rasa memiliki masyarakat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menciptakan tata kelola wisata yang demokratis dan berkelanjutan.

5. Proses Kolaborasi

Dialog antaraktor dalam pengembangan Desa Wisata Cibereum mulai menunjukkan kemajuan melalui komunikasi antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan sebagian masyarakat. Namun, proses tersebut masih bersifat sporadis dan belum terlembagakan dalam

kerangka kolaboratif yang berkelanjutan. Dalam perspektif *collaborative governance*, Ansell dan Gash menegaskan bahwa dialog yang terstruktur dan berkelanjutan merupakan prasyarat utama untuk membangun kepercayaan dan komitmen bersama. Tanpa mekanisme dialog yang difasilitasi secara formal, kolaborasi cenderung berhenti pada komunikasi awal tanpa menghasilkan konsensus substantif.

Kepercayaan antaraktor di Cibereum juga belum sepenuhnya terbentuk, terutama karena pengalaman sebelumnya yang minim transparansi dan terbatasnya ruang partisipatif. Emerson dan Nabatchi menjelaskan bahwa kepercayaan hanya dapat tumbuh melalui proses deliberatif yang inklusif, transparan, dan setara. Ketika keputusan masih didominasi aktor tertentu dan belum tersedia forum multipihak yang jelas, maka partisipasi masyarakat belum mencapai tingkat kemitraan yang sejajar.

Meskipun demikian, manfaat ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat—seperti peningkatan pendapatan UMKM dan jasa lokal—menjadi hasil awal yang positif. Dalam teori kolaborasi, capaian awal semacam ini penting untuk memperkuat legitimasi dan mendorong komitmen lanjutan. Namun, partisipasi berbasis manfaat ekonomi perlu ditransformasikan menjadi partisipasi yang sadar akan tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan, budaya, dan keberlanjutan desa wisata.

Oleh karena itu, diperlukan fasilitasi yang lebih sistematis melalui pembentukan forum deliberatif, pendampingan kelembagaan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Dukungan pemerintah daerah dan mitra eksternal dapat berperan sebagai mediator untuk membangun kesetaraan dan akuntabilitas. Dengan institusionalisasi dialog dan penguatan kepercayaan, kolaborasi di Desa Wisata Cibereum dapat berkembang menjadi tata kelola yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Cibereum masih berada pada tahap awal dan menghadapi sejumlah tantangan struktural serta partisipatif. Meskipun terdapat potensi alam dan sosial yang besar, pengelolaan wisata belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara aktif dan setara. Proses kolaborasi masih didominasi oleh aktor tertentu, dengan struktur kelembagaan dan regulasi yang belum mendukung tata kelola lintas sektor secara optimal. Melalui analisis lima dimensi *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) yakni kondisi awal, sumber daya, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi teridentifikasi

bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kepercayaan antaraktor, kepemimpinan yang inklusif, serta adanya forum multipihak yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat mulai merasakan manfaat ekonomi dari aktivitas wisata, namun belum sepenuhnya memahami peran strategis mereka dalam pengembangan desa wisata. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, pembentukan forum deliberatif, serta fasilitasi dari aktor eksternal seperti perguruan tinggi dan LSM menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola wisata yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Penerapan *collaborative governance* yang efektif diharapkan dapat menjadikan Desa Wisata Cibereum sebagai model pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENCE

1. WTTC. World Travel and Tourism Council. 2024. Travel & Tourism Economic Impact 2024. Available from: <https://wtcc.org/>
2. Comerio, N., & Strozzi F. Tourism and local development in developing countries. *A Syst Rev Sustain* [Internet]. 2018; Available from: <https://doi.org/10.3390/su10072361>
3. Nunkoo, R., Ramkissoon, H., & Gursoy D. Public trust in tourism institutions. *Ann Tour Res*. 2019;
4. Panić M. Tourism as a tool for poverty alleviation in rural communities. *J Rural Dev Stud*. 2024.
5. Nagari JP. *Jurnal Pembangunan Nagari*. 2025;10(1):20–37.
6. Čurčić, N., Stankov, U., & Pavluković V. Community-based tourism in rural areas: A pathway to sustainability. - *ournal Tour Cult Chang*. 2021;
7. Revida E. Integrasi budaya lokal dalam pengembangan desa wisata. *J Sos Hum*. 2023;
8. Minardi, A., Hidayat, T., & Ramadhani R. Potensi sosial budaya dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan. *J Pembang Wil dan Desa*. 2020;
9. Rizqiyah AA. Good News From Indonesia. 2024. Kemenparekraf Tetapkan Target Desa Wisata Mencapai 6000 Tahun Ini. Available from: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/02/20/kemenparekraf-tetapkan-target-desa-wisata-mencapai-6000-tahun-ini>
10. Fanida, E., & Oktarianda R. Kontribusi desa wisata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia. *J Ekon dan Kebijakan Publik*. 2021;
11. Ginting, R., Sembiring, M., & Tarigan E. Desa wisata sebagai wahana pelestarian budaya dan pembangunan berkelanjutan. *J Pariwisata Nusant*. 2023;
12. Antara, I. N. G., Suryawan, I. W., & Yasa IN. Strategi pengembangan desa wisata berbasis budaya lokal. *J Kepariwisata Indonesia*. 2021;
13. Iswari R. Peran usaha mikro dalam pengembangan desa wisata berbasis komunitas. *J Ekon Kreat dan Pariwisata*. 2023;

14. Towoliu, M., Lantang, S., & Rante H. Pelestarian budaya melalui pengembangan desa wisata. *J Antropol Indones.* 2023;
15. Purnomo H. Strategi penguatan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis komunitas. *J Ekon dan Pembang.* 2020;
16. Junaid I, Dewi WO, Said A, Hanafi H. Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan : Studi Kasus di Desa Paccekke , Kabupaten Barru , Indonesia Developing Sustainable Tourism Village : A Case Study at Paccekke Village , Barru Regency of Indonesia. 2022;6(3):287–301.
17. Jimenez-Garcia, M., Saura, J. R., & Reyes-Menendez A. Exploring the impact of user-generated content on tourist destination image through sentiment analysis. *Technol Forecast Soc Change.* 2020;
18. Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.; 2017.
19. John W. Creswell. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.).* Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; 2014.
20. Nazir M. *Metode penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.; 2013.
21. Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta; 2019.
22. Denzin NK LY. *Handbook of Qualitative Research.* Terjemahan Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009.
23. Ansell, C., & Gash A (2008). Collaborative governance in theory and practice. *J Public Adm Res Theory.* 2008;
24. Ansell C, Gash A. Collaborative governance in theory and practice. *Adm Res Theory.* 2007;18(4):543–71.